BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan dalam penelitian ini mengenai strategi *Multi-Stakeholder Partnership* (MSP) dalam kerangka kerja *International Telecommunication Union* (ITU) dan inisiatif *Alliance for Affordable Internet* (A4AI), dapat disimpulkan bahwa:

1. *Multi-Stakeholder Partnership* (MSP) dalam kerangka *International Telecommunication Union* (ITU) melalui inisiatif *Alliance for Affordable Internet* (A4AI) memainkan peran kunci dalam mewujudkan akses digital yang terjangkau dengan memadukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Melalui pendekatan ini, ITU dan A4AI berhasil mendorong advokasi kebijakan yang mendukung keterjangkauan internet, pembangunan infrastruktur digital, serta harmonisasi standar teknis termasuk penerapan prinsip “1GB data ≤ 2% pendapatan bulanan” sebagai acuan global. Inisiatif seperti *Connect 2030 Agenda* dari ITU dan program-program A4AI menciptakan sinergi yang nyata dalam mengurangi kesenjangan digital, baik di tingkat global maupun nasional. Selain itu, kemitraan ini juga memfasilitasi mobilisasi sumber daya, transfer

teknologi, dan penguatan kapasitas kelembagaan, yang menjadi faktor penting dalam memperluas akses internet yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, model MSP terbukti efektif sebagai kerangka kerja kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan digital inklusif.

2. Di Indonesia, penerapan MSP dalam tata kelola digital telah menunjukkan hasil yang signifikan, tercermin dari kebijakan seperti Universal Service Obligation (USO), program BAKTI Kominfo, dan penetapan tarif dasar oleh BRTI. Capaian konkretnya antara lain peningkatan penetrasi internet hingga 79,5% pada tahun 2024 dan penurunan harga data sebesar 20% dalam lima tahun terakhir. Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan akses yang tinggi antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kurang optimalnya koordinasi antarlembaga, serta tumpang tindih regulasi yang menghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh. Selain itu, partisipasi Usaha Menengah Nasional (UMEN) dalam forum standarisasi global masih terbatas, mengurangi daya saing Indonesia di tingkat internasional. Strategi MSP ini sejalan dengan Target 17.16 SDGs yang menekankan pentingnya kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, di mana ITU dan A4AI berkontribusi dalam mobilisasi pengetahuan dan pendanaan. Namun, agar dampaknya lebih berkelanjutan, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat

sipil. Dengan demikian, meskipun MSP telah memberikan kemajuan, upaya lebih besar masih diperlukan untuk mencapai akses digital yang benar-benar inklusif dan terjangkau di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas strategi MSP dalam upaya mewujudkan akses digital yang terjangkau sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-17 di Indonesia.

1. Untuk memperkuat peran MSP dalam kerangka ITU dan A4AI, pemerintah Indonesia perlu: (1) Meningkatkan kapasitas delegasi Indonesia di forum ITU melalui pelatihan reguler tentang standarisasi telekomunikasi global, (2) Membentuk pusat penelitian kebijakan digital yang berkolaborasi dengan A4AI untuk menghasilkan data pendukung advokasi harga terjangkau, dan (3) Mengembangkan model subsidi silang berbasis kinerja dimana operator yang berhasil menurunkan harga di daerah perkotaan wajib mengalokasikan sebagian keuntungan untuk pengembangan infrastruktur daerah 3T. Selain itu, perlu dibuat mekanisme insentif non-fiskal seperti prioritas akses spektrum frekuensi bagi operator yang konsisten memenuhi target keterjangkauan ITU.
2. Untuk meningkatkan efektivitas MSP di tingkat nasional, rekomendasi utamanya adalah dengan membentuk Dewan Digital Indonesia yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas) dengan mandat khusus untuk menyelesaikan tumpang